

## Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan daerah Pemkab Luwu Timur capai 101 persen



Wakil Bupati Luwu Timur Mochammad Akbar Laluasa (kiri) saat penyerahan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 di Lutim, Jumat (21/6/2024). ANTARA/HO/Pemkab Lutim

Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/544143/pendapatan-daerah-pemkab-luwu-timur-capai-101-persen>

Makassar (ANTARA) - Wakil Bupati Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan Mochammad Akbar Andi Leluasa mengatakan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi Rp1,778 triliun dan PAD sebesar Rp394,9 miliar atau sekitar 101,09 persen dari target Rp390,6 miliar.

"Untuk target pendapatan Luwu Timur pada tahun anggaran 2023 melebihi target dan PAD yakni 101,09 persen," ujarnya saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 di Lutim, Jumat.

Mochammad Akbar dalam pemaparan di hadapan para anggota DPRD Lutim merincikan target pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.776.608.283.423, dan terealisasi sebesar Rp1.778.344.595.911.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) target sebesar Rp390.691.353.806 dan terealisasi sebesar Rp394.955.306.615 atau 101,09 persen.

Pendapatan transfer dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp1,32 triliun dengan realisasi Rp1,33 triliun lebih.

Sementara untuk pendapatan daerah yang sah dengan target sebesar Rp62,4 miliar terealisasi sebesar Rp51,6 miliar.

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, di mana pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan dapat terealisasi sebesar Rp173,6 miliar lebih atau 100 persen dari yang ditargetkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp10,5 miliar atau 82,00 persen.

Dengan demikian, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp163 miliar lebih total realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi dengan total belanja dan transfer daerah tersebut di atas, maka terdapat defisit sebesar Rp59,4 miliar lebih.

Sehingga berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103,5 miliar lebih.

Moch. Akbar menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur pada 2023, Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023 dan hasil audit BPK telah memberikan pendapat Unqualified Opinion atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal sehingga posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," ucapnya.

Hal ini terkait dengan, Realisasi Penerimaan [Pendapatan Asli Daerah](#) (PAD) Kota Makassar untuk tahun 2023 belum mencapai target yang telah

ditetapkan sebesar Rp 1,48 triliun. Hingga saat ini, realisasi PAD hanya mencapai Rp 1,38 triliun lebih.

Sementara itu, distribusi daerah hanya mencapai Rp 68,51 miliar dari target Rp 204,12 miliar, atau sekitar 33,56 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga hanya mencapai Rp 27,20 miliar lebih dari target Rp 88,26 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, menjelaskan bahwa target PAD sebesar Rp2 triliun baru akan tercapai pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026.

"Pada item proyeksi pendapatan, ditetapkan pendapatan sebesar Rp 2 triliun akan dicapai pada tahun 2025. Untuk PAD dari year to year, realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1,3 triliun lebih dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1,5 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar 12 persen.

Berdasarkan data tersebut, penerimaan dari realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan, dan ini merupakan sejarah penerimaan PAD telah mencapai Rp 1,5 triliun lebih," ujar Danny Pomanto saat rapat paripurna Sabtu (22/6/2024) malam.

Danny menyebutkan bahwa strategi Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di masa mendatang akan dilakukan melalui beberapa langkah.

"Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta peningkatan pengawasan dengan melibatkan APH. Kedua, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengoptimalkan penggunaan sistem cashless dalam pelayanan retribusi daerah," jelasnya.

Terkait adanya indikasi kebocoran pendapatan di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Makassar, Danny mengakui adanya kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan. Khususnya, Perumda Parkir yang seharusnya memiliki potensi pendapatan baru, namun tidak dikelola dengan baik.

Danny menjelaskan, bahwa Perumda Parkir saat ini sudah melaksanakan tahapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan serta evaluasi pendapatan di internal Perumda Parkir.

"Hal ini berdampak positif terhadap kenaikan setoran dividen Rp 2 miliar lebih, atau naik hampir 300 persen dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

"Dalam pemenuhan tahapan selanjutnya dari sisi eksternal terkait pengelolaan dan pengawasan, saat ini proses menunggu terbentuknya regulasi Ranperda tentang pengelolaan yang telah diajukan oleh Perumda Parkir kepada legislatif melalui Komisi B DPRD Kota Makassar. Apabila tahapan-tahapan tersebut sudah ditetapkan menjadi regulasi dan sudah memenuhi kajian yang terukur, tidak menutup kemungkinan, insya Allah, target Rp 1 triliun dapat tercapai sesuai harapan anggota dewan yang terhormat," tutupnya. (Fahrullah/B)

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/544143/pendapatan-daerah-pemkab-luwu-timur-capai-101-persen>
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/06/23/pad-pemkot-makassar-belum-capai-target-ini-jawaban-wali-kota-makassar/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan